

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

### 1.1.1 Kondisi Geografis Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50' - 7°50' Lintang Selatan dan 104°8' - 108°41' Bujur Timur, dengan batas – batas wilayah Sebelah Utara ( Laut Jawa dan DKI Jakarta), Sebelah Timur (Provinsi Jawa Tengah), Sebelah Selatan (Samudra Indonesia), Sebelah Barat (Provinsi Banten).



Grafik 1.1 Peta Provinsi Jawa Barat

Sumber : Jabar Provinsi, 2020

Struktur geologi Jawa Barat sangat kompleks, dengan daerah pegunungan di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di utara. Secara administratif, Jawa Barat terbagi menjadi 27 Kota dan 18 Kabupaten, dengan 626 kabupaten, 641 kelurahan dan 5.321 desa.

### 1.1.2 Demografi Jawa Barat

Jumlah penduduk Jawa Barat menurut BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 mencapai 49.935.858 jiwa, terdiri dari laki – laki sebanyak 24.962.701 jiwa dan

perempuan sebanyak 24.354.011 jiwa. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat pada periode 2016 – 2020 setiap tahunnya meningkat seperti ditunjukkan pada Tabel 1.1 LPP menurut Kabupaten/Kota

Table 1.1 LPP Menurut Kabupaten/Kota

Wilayah Jawa Barat	LPP Menurut Kabupaten/Kota				
	2020	2019	2018	2017	2016
Provinsi Jawa Barat	1.26	1.3	1.34	1.39	1.43

Sumber : bps.go.id

Menurut Sensus Penduduk tahun 2020, Provinsi Jawa Barat memiliki penduduk 48.274.162 Jiwa. Terdiri dari 23.765.277 perempuan dan 24.508.885 laki – laki. berdasarkan kelompok umur 0-14 tahun mencapai 29,77%, kelompok umur 15-64 (usia produktif) mencapai 70,68% dan kelompok 60 tahun ke atas mencapai 9,00% seperti yang ditunjukkan pada. Rasio ketergantungan penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 46,57%. Angka tersebut menunjukkan bahwa untuk setiap 100 penduduk usia kerja (15-64 tahun) ada sekitar 47 orang adalah usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) yang menunjukkan jumlah tanggungan di penduduk wilayah tersebut.

### 1.1.3 Fisiografi Jawa Barat

Secara Fisiografi yang dilihat dari segi fisik garis lintang dan garis bujur serta posisi dengan daerah lain Jawa Barat dapat distratifikasikan kedalam 4 strata wilayah Pembangunan Pertanian yaitu:

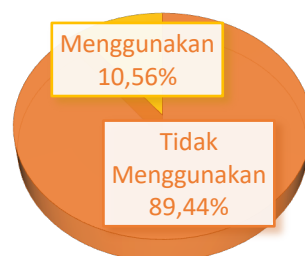
1. Wilayah dataran rendah sebelah utara, yaitu wilayah yang terutama berpokok kepada usaha tani sawah dengan hasil utama padi meliputi kabupaten Karawang, Indramayu, Subang, Bekasi dan Cirebon .
2. Wilayah dataran tinggi bagian tengah, dimana keadaan usaha padi sawah dan darat hampir berimbang keadaannya, dengan hasil yang beraneka ragam seperti padi, palawija, sayur-sayuran dan tanaman hias meliputi kabupaten Bandung, Sumedang, Purwakarta, Garut, Kuningan , Bogor , Cianjur.

3. Wilayah Banten bagian tengah dan selatan dimana pertanian pada lahan kering (darat) lebih dominan, sawah lebih sedikit dan pertanian pada lahan kering terutamakomoditas buah-buahan meliputi Serang, Pandeglang dan Lebak.

## 1.2 Latar Belakang

Pada era informasi, Internet menjadi meta-infrastruktur yang merupakan prasyarat penting dalam partisipasi seluruh sektor dalam *knowledge-based economy*. Terdapat fakta bahwa peningkatan penetrasi Internet sebesar 10% di suatu negara bisa meningkatkan produktivitas ekonomi sebesar 1.38% (Kelly dan Rossotto, 2012). Pengembangan TIK diakui sebagai alat penting yang dapat membantu memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan keterampilan mereka, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas hidup mereka melalui peningkatan tingkat ekonomi (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2015). Di Jawa Barat sekitar 3.250.825 keluarga bergantung pada pertanian (pertanian, penggembalaan, dan berkebun). Sebagian besar berasal dari produsen bahan pokok beras yaitu 2.249.012, peternak 1.435.367, dan sektor pertanian atau peternakan lainnya seperti hortikultura dan budidaya ikan (BPS 2020). Aktivitas tersebut merupakan usaha yang dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhannya, namun masih sedikit yang memanfaatkan ICT dalam aktivitasnya. Seperti yang tertera pada gambar 1.2 unit usaha yang memanfaatkan ICT masih rendah. Sekitar 10,56% yang sudah menggunakan dan dapat menerima penerapan dari ICT.

### PENGGUNAAN INTERNET PADA UNIT USAHA



Gambar 1.2 Persentase Unit Usaha Menurut Penggunaan Internet

Sumber : BPS, 2016

Ketimpangan perkembangan teknologi antar wilayah yang cukup tinggi menjadi faktor rendahnya penerimaan ICT di Desa Jawa Barat. Kesenjangan antar wilayah terlihat dari masih terdapatnya 122 kabupaten di Indonesia yang merupakan daerah tertinggal (Bappenas, 2017). Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017, 40 persen desa di Indonesia belum tersentuh teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penggunaan teknologi sangat dibutuhkan untuk mendorong pembangunan ekonomi maupun untuk menciptakan keunggulan bersaing bagi entitas unit usaha agar tingkat kemiskinan menurun (Radhi, 2005).

Tingkat kemiskinan di Jawa Barat sendiri tiap tahunnya meningkat. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu September 2019 – September 2020, secara absolut penduduk miskin di Jawa Barat terjadi kenaikan sekitar 0,81 juta jiwa yaitu dari 3,38 menjadi 4,19 juta jiwa. Di daerah perkotaan, persentase penduduk miskin bertambah sekitar 1,81 persen yaitu dari 5,98 menjadi 7,79 persen (September 2019 – September 2020). Pada daerah pedesaan, persentase penduduk miskin bertambah sekitar 1,06 dari 9,58 menjadi 10,64 persen (BPS Jabar, 2020)

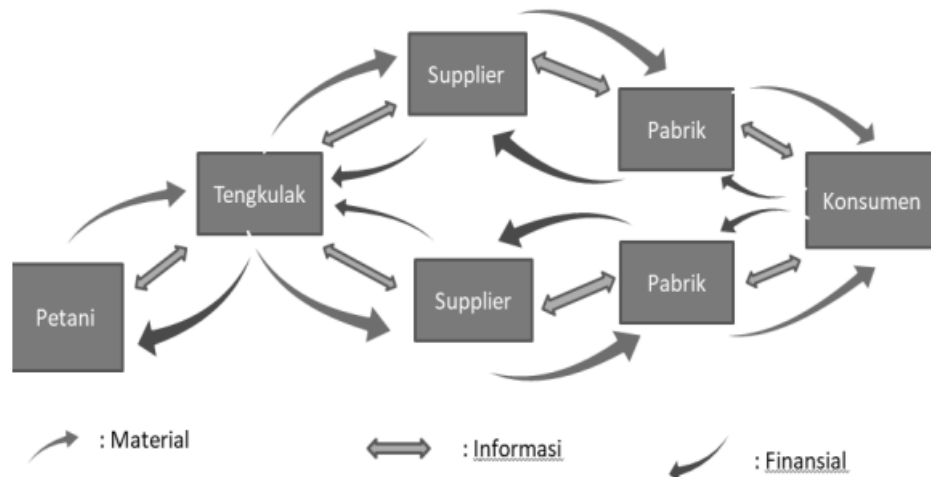
Tabel 1.2 Presentase Penduduk Miskin

Wilayah	Presentase Penduduk Miskin					
	Perkotaan			Pedesaan		
Jawa Barat	September	Maret	September	September	Maret	September
	2019	2020	2020	2019	2020	2020
	5,98	7,14	7,79	9,58	10,27	10,64

Sumber : BPS Jabar 2020

Masyarakat desa belum dapat menguasai akses pasar yang lebih luas, karena pihak ke dua yang biasa disebut tengkulak menguasai akses ke pasar yang lebih luas (L. Megasari, 2009). Akses terhadap informasi dan teknologi baru masih sangat terbatas. Hal ini diakibatkan karena mayoritas unit usaha di daerah pedesaan yang *relative* terbatas sarana dan prasarana transportasi dan komunikasinya. Akibatnya tingkat serapan unit usaha terhadap inovasi dan teknologi baru masih rendah (Zaenab dan Siti, 2017).

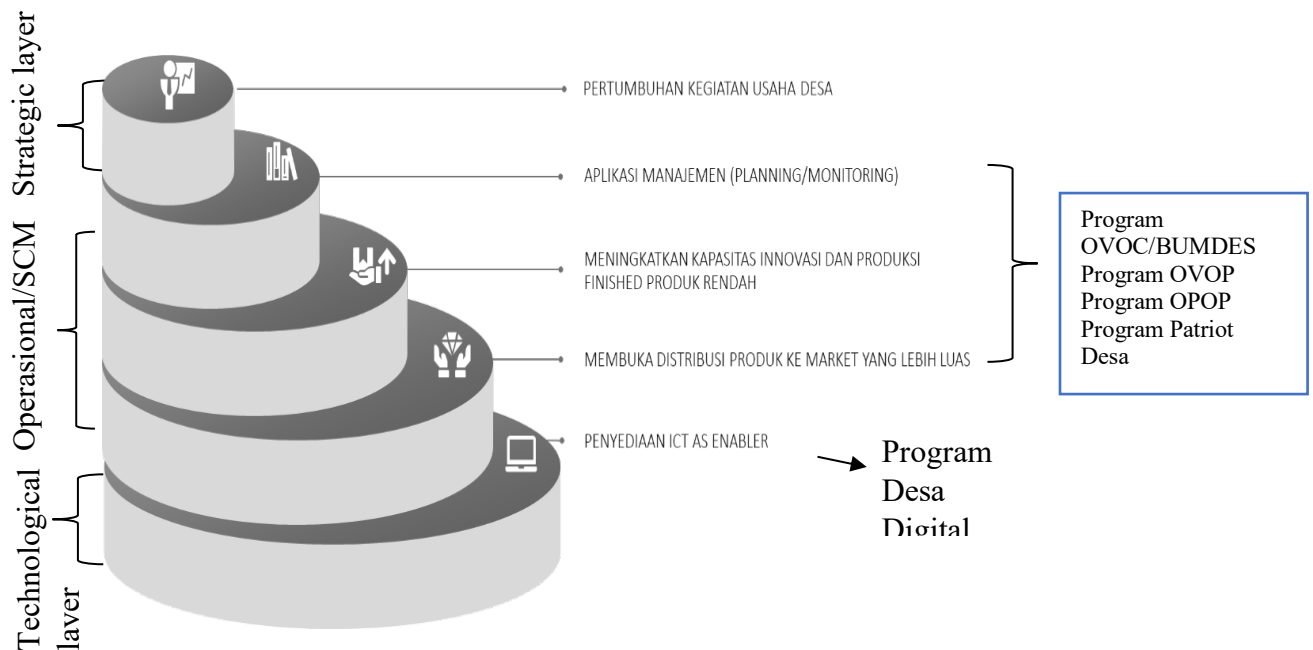
Sudut pandang berjalannya rantai pasokan pada umumnya bersifat tradisional. Mekanisme tradisional adalah unit usaha menjual produknya langsung di pasar atau melalui tengkulak, dan tengkulak menjualnya ke pasar tradisional dan supermarket (Apriyanti, 2012). Pada gambar 1.4 ditunjukkan aliran rantai pasok pedesaan, dimana akses unit usaha kepada pasar tergantung kepada tengkulak (Hasanuddin, 2009) yang dapat menentukan harga secara sepihak. Ketergantungan kepada tengkulak pun mengakibatkan distribusi produk secara langsung yang dilakukan oleh unit usaha kepada konsumen memiliki ruang yang sempit. Penyebab lainnya, sumberdaya manusia yang tidak tergarap dengan baik dan unit usaha yang tidak berkembang sehat membuat masyarakat desa tidak sejahtera (Pranadji, 2016).



Gambar 1.3 Rantai Pasok

Sumber : Nisfi Fadri Nadhif, 2018

Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa telah dilakukan oleh Pemerintah. Melalui Program One Village One Company (OVOC)/ (BUMDes) , Program OVOP, Program One Pesantren One Product (OPOP) dan Program Patriot Desa untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan alam agar meningkatkan pertumbuhan kegiatan usaha desa, meningkatkan inovasi dan produksi di desa, dan membuka distribusi produk desa ke market yang lebih luas (Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, 2019).



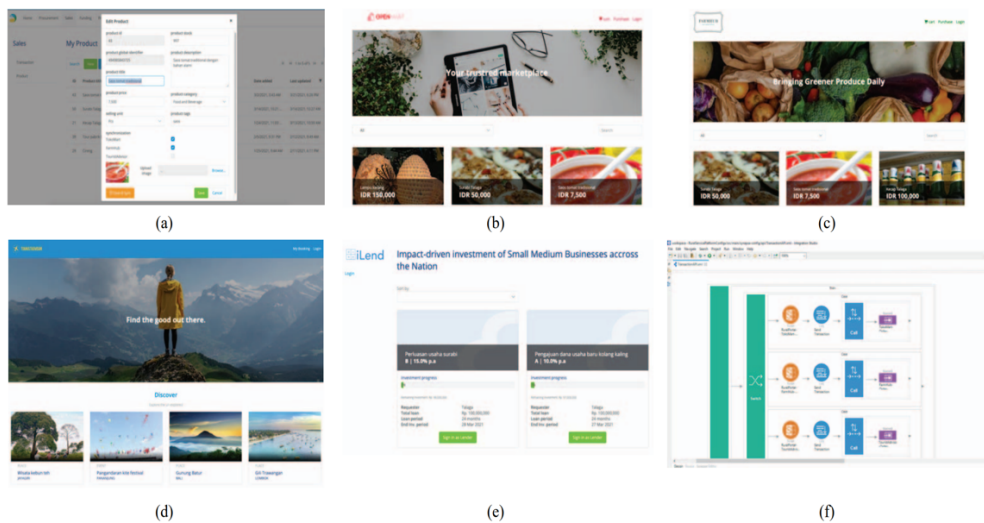
Gambar 1.4 Strategi Utama Peningkatan Kegiatan Usaha Di Jawa Barat

Gambar 1.4 menunjukkan dalam mendukung upaya Pemerintah, Diskominfo berperan dalam meningkatkan kegiatan usaha di pedesaan sebagai penyedia ICT. Saat ini Diskominfo sedang membangun *E-business Service Platform* untuk Desa dengan *interface Website* dan Aplikasi Android/IOS untuk diadopsi diseluruh pedesaan di Jawa Barat. *E-Business Service Platform* merupakan sebuah platform aplikasi yang berfungsi sebagai media transaksi bertemunya badan usaha sebagai pengumpul produk dari beberapa produsen produk yang akan terkoneksi dengan platform pihak ketiga seperti *marketplace*, aplikasi pembiayaan usaha dan sebagainya. *E-Business Service Platform* merupakan upaya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui teknologi informasi. Platform ini ditujukan untuk membantu para unit usaha di daerah pedesaan agar dapat berpartisipasi dalam ekosistem bisnis digital. Terdapat lima fungsi utama dalam platform ini:

1. Akses pemasaran: perluasan akses pasar atas produk / layanan desa, melalui integrasi dengan beragam online marketplace (contoh: Tokopedia, BukaLapak, BorongdongID, TaniHub, dsb).

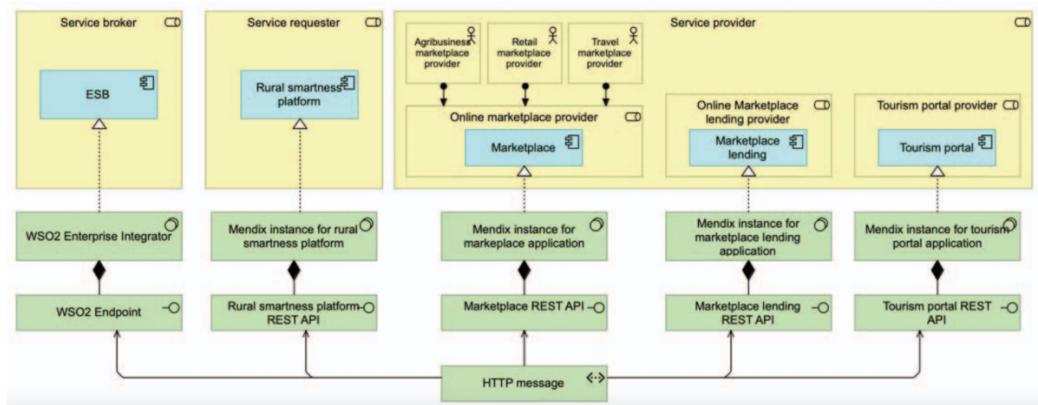
2. Akses pendanaan: menghubungkan unit usaha pedesaan dengan akses pendanaan, melalui integrasi dengan beragam platform pendanaan (contoh :Investree, Amarnya, BRI Ceria, dsb).
3. Promosi desa: menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke desa, melalui integrasi dengan beragam portal informasi wisata (contoh: TripAdvisor, Traveloka Explore, Lonely Planet, dsb).
4. Kolaborasi: kolaborasi bisnis antar unit usaha pedesaan melalui fasilitas transaksi *business-to-business*.
5. Analisa data: dukungan data bagi pemerintah untuk perumusan kebijakan yang lebih akurat dalam rangka meningkatkan iklim ekonomi pedesaan.

Dapat dilihat pada gambar 1.4 dan Gambar 1.5 merupakan *Prototype* karakteristik yang ada pada *E-Business Service Platform*.



Gambar 1.4 Screenshot Prototype E-Business Service Platform : (a) administrasi produk, (b) retail marketplace platform, (c) agribusiness marketplace platform, (d) portal travel dan turis, (e) akses pendanaan, (f) konfigurasi ESB

Sumber : Mukti et al, 2021

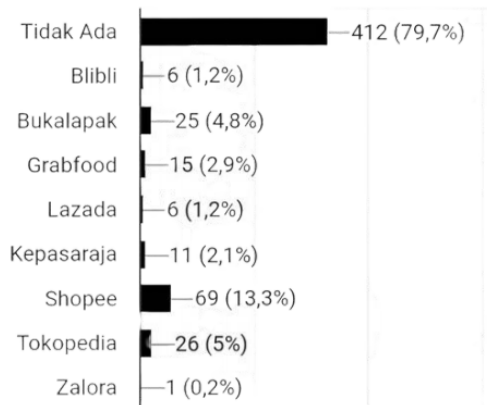


Gambar 1.6 Prototype Arcitecture

Sumber : Mukti et al, 2021

Dalam prosesnya *E-Business Service Platform* yang sedang dibangun Diskominfo Jabar belum tentu dapat diterima unit usaha di desa. Banyak platform yang telah dibangun oleh pemerintah tidak digunakan oleh unit usaha di desa. Penelitian yang dilakukan Soniansi tahun 2020 di provinsi Jawa Barat menemukan bahwa platform Toko Tani Indonesia (TTI) yang dibuat pemerintah tidak banyak yang menggunakan. Penggunaan platform TTI yang mudah diaplikasikan, namun tidak semua kelompok tani dan pengelola TTI melakukan transaksi, diantaranya akibat terbatasnya kemampuan kelompok tani dalam menggunakannya ( Soniansi, 2020). Penelitian yang dilakukan Anwar pada tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Pangandaran belum sepenuhnya terintegrasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerapan SID, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Infrastruktur, dan Kesiapan Teknologi. Sumber daya manusia tertuju pada kurangnya operator komputer di Pemerintahan Desa. Faktor infrastruktur, yakni jaringan telekomunikasi yang belum memadai. Faktor kesiapan teknologi, yaitu belum semua orang siap dengan adanya teknologi yang ada dalam tahap pengembangan. Dalam Laporan Bupati Kendal dalam tentang digitalisasi UMKM Kendal, platform Kepasaraja.id yang dibuat oleh pemerintah Kendal hanya digunakan 11 unit usaha atau sekitar 2,1 % terlihat pada gambar 1.6 mayoritas unit usaha tidak menggunakan platform yang tersedia.





Gambar 1.6 Survei Penggunaan Platform ada Unit Usaha

Sumber : Pemda Kab. Kendal

Berdasarkan Hasil survei penggunaan platform pada unit usaha dengan sampel sebanyak 3.504 yang tersebar di 101 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia pada 2020 pada gambar 1.7, menunjukkan bahwa hanya 15,08 persen yang menggunakan platform. Hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan melalui internet di Indonesia masih tergolong rendah.



Gambar 1.7 Unit Usaha Pengguna Platform

Sumber : BPS, 2019

Berdasarkan jumlah 84,92 persen unit usaha yang tidak menggunakan platform, alasan terbanyak karena lebih nyaman berjualan secara langsung (*offline*) yaitu sebanyak 70,89 persen. Alasan terbanyak kedua adalah tidak tertarik melakukan kegiatan usaha menggunakan platform sebanyak 42,52 persen. Dan alasan terbanyak ketiga unit usaha tidak menggunakan platform adalah kurangnya pengetahuan atau keahlian dalam penggunaan platform yaitu sebanyak 21,78

persen (BPS, 2019). Saat ini pengguna *E-Business Service Platform* sudah pada tahap pertama dengan adanya *prototype*. *Prototype* ini sudah disosialisasikan dalam workshop dengan 100 unit usaha yang ada di Jawa Barat, namun untuk tahap pertama ini yang menggunakan hanya 47 unit usaha.

Berdasarkan penelitian Anwar pada tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran, Soniansi tahun 2020 di provinsi Jawa Barat, laporan Bupati Kendal dan hasil survei penggunaan platform pada unit usaha diatas kendala penggunaan teknologi yang sudah diterapkan, ada beberapa faktor yang memicu kegagalan dalam penerapan teknologi untuk penggunaannya. Mulai dari faktor keterbatasan kemampuan dalam menggunakan platform, sumber daya manusia, Infrastruktur dan kesiapan teknologi. Dalam penelitian ini diharapkan penerapan *E-business service platform* tidak mengalami kegagalan. Secara umum untuk teknologi baru yang diterapkan harus diukur seberapa besar tingkat penerimaan teknologi tersebut bagi pengguna (David, 1989). Penelitian ini menggunakan *Unified Theory Of Acceptance and Use Of Technology* (UTAUT) yang dikembangkan oleh Venkatesh et al, 2003. Penggunaan model ini dapat mengetahui gambaran dari faktor-faktor yang berpengaruh dalam penerimaan dan penggunaan terhadap sebuah teknologi. Model UTAUT menggunakan variabel *performance expectancy* yang didefinisikan sebagai sejauh mana penggunaan suatu teknologi akan memberikan manfaat bagi pengguna dalam melakukan aktivitas tertentu, *effort expectancy* adalah tingkat kemudahan yang terkait dengan penggunaan teknologi oleh pengguna, *social influence* adalah sejauh mana pengguna merasakan bahwa orang lain yang penting (misalnya, keluarga dan teman) percaya bahwa mereka harus menggunakan teknologi tertentu; dan *facilitating conditions* mengacu pada persepsi pengguna tentang sumber daya dan dukungan yang tersedia untuk melakukan suatu perilaku (Venkatesh et al. 2012).

Teknologi informasi tidak netral secara budaya, sehingga pengembangan *m-commerce* akan kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi sosial suatu negara atau wilayah, ekonomi, dan latar belakang budaya ( Min, Q. Et al 2008).

Di Pedesaan Jawa Barat budaya gotong royong masih terasa dalam kehidupan sehari – hari masyarakat. Melalui sesi wawancara dengan pejabat desa dan patriot

desa terkonfirmasi bahwa keseharian masyarakat dalam penggunaan teknologi dilakukan secara bersamaan dan saling meminjamkan. Hal ini menjadikan budaya gotong royong ditambahkan menjadi variabel, karena dianggap berpengaruh terhadap penggunaan teknologi.

Unit usaha di Pedesaan memang masih rendah untuk terbuka terhadap hal baru terkait unsur teknologi informasi, sehingga memperburuk situasi dalam mengambil keputusan menolak atau menerima inovasi (Mulyandari, et.al. 2010). Sehingga perlu strategi yang tepat agar *E-Business Service Platform* yang sedang dibangun dapat diterima oleh unit usaha di Pedesaan.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor apa yang paling penting diperhatikan untuk meningkatkan penggunaan *E-Business Service Platform* agar lebih banyak yang menggunakan ?
2. Program apa yang tepat dalam upaya peningkatan penggunaan *E-Business Service Platform* supaya lebih banyak digunakan oleh unit usaha pedesaan?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dinyatakan sebagai berikut: Mengusulkan strategi yang dapat mempengaruhi peningkatan penggunaan *E-Business Service Platform* yang lebih produktif oleh masyarakat pedesaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, objektif-objektif berikut perlu diraih :

1. Menentukan faktor terpenting dalam untuk meningkatkan penggunaan *E-Business Service Platform* agar lebih banyak yang menggunakan..
2. Mengusulkan program terbaik dalam upaya peningkatan penggunaan *E-Business Service Platform* yang lebih banyak yang menggunakan..

### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Manfaat untuk keilmuan Teknik Industri, menambah studi *literature* dalam peningkatan produktifitas yang efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan *E-Business Service Platform*

## 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah untuk mengetahui kesiapan masyarakat Perdesaan di Jawa Barat terhadap penerapan konsep *smart village* dan membantu dalam pembangunan desa secara umum di wilayahnya.
- b. Manfaat untuk unit usaha pedesaan, mengetahui strategi untuk peningkatan adopsi *E-Business Service Platform* yang lebih produktif oleh masyarakat pedesaan

### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran dari keseluruhan proses penelitian. Pada sub bab ini, peneliti menjabarkan sistematika penulisan dalam tiga bab yaitu :

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang kerangka penulisan.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini memuat tentang penjelasan teori dan referensi secara ringkas yang digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.

#### **Bab III Metodologi Penelitian**

Pada bab ini membahas tentang rancangan model konseptual dan sistematika pemecahan masalah serta metode yang diggunakan. Bab ini berisi juga penjelasan jenis penelitian, operasional variable yang digunakan, tahapan penelitian, populasi yang digunakan, dan teknik analisis data penelitian.

#### **Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini menguraikan hasil dari perumusan masalah serta tujuan penelitian. Pada setiap aspek dibahas pada bab ini mulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan.

## **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini berisikan tafsir hasil analisis temuan penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan pada bab ini menjawab perumusan masalah dan pertanyaan penelitian.